



## PEMIKIRAN NURCHOLISH MADJID TENTANG AGAMA DAN NEGARA

Abubakar Madani\*

***Abstract:** Thought of Islamic state or Islamic as a state has caused the form of apologetic. A state claims its self as an Islamic state but the content is not Islamic, or in other words that Moslem is not compulsory to develop an Islamic state, but is compulsory to carry out Islamic values including through the government in a state. Democracy is the only political choice for Indonesian people. Hence, the democracy values fully objective and there is nothing that opposites to the religion norm. In the application they must feed each other, especially that the religion can give ethic power, moral, and spiritual for the development of democratization and the existence of national state is not being a problem. Hence, nationalism as a life principle that is centrally clear can not be accepted, but it is not a problem that a moslem being nationalist. Islam is opposed fascism not nationalism.*

***Key words:** Nurcholish Madjid, religion, state*

### I. PENDAHULUAN

Hubungan agama dan Negara selalu menjadi topik yang menarik bagi para pemikir politik Islam, baik yang beragama Islam maupun bukan. Bagi umat Islam munculnya topik pembicaraan tersebut berangkat dari dua persoalan. Pertama, apakah kerasulan Muhammad SAW mempunyai kaitan dengan masalah politik, atau apakah Islam merupakan agama yang terkait erat dengan urusan politik kenegaraan dan pemerintahan. Kedua, apakah sistem dan bentuk pemerintahan, sekaligus prinsip-prinsipnya terdapat dalam Islam.<sup>1</sup>

Munculnya permasalahan tersebut dipandang wajar, karena risalah Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW adalah agama yang mencakup ajaran dan undang-undang (*gawanin*) yang bertujuan membangun manusia guna

---

\* Dosen Tetap STAIN Samarinda

<sup>1</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara* (Jakarta: UI Press, 1993), h. 2.



memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Artinya, Islam menekankan agar terdapat keselarasan antara kepentingan duniawi dan ukhrawi.<sup>2</sup>

Sejarah mencatat bahwa permasalahan pertama yang dipersoalkan oleh generasi pertama umat Islam sesudah Muhammad Rasulullah wafat adalah masalah kekuasaan politik, atau pengganti beliau yang akan memimpin umat (suksesi), atau lazim juga disebut dengan persoalan *imamah*. Al-Qur'an sebagai acuan utama di samping Sunnah Nabi sedikit pun tidak menyiratkan petunjuk tentang pengganti Nabi atau tentang sistem dan bentuk pemerintahan serta pembentukannya.

Berdasarkan hal tersebut di atas tidaklah mengherankan kalau dalam pentas perjalanan sejarah umat Islam, pasca Nabi sampai abad modern ini, umat Islam menampilkan berbagai sistem dan bentuk pemerintahan mulai dari bentuk republik yang demokratis sampai ke bentuk monarki absolut.

Keragaman bentuk kenegaraan dan pengalaman politik "Negara Islam", selain bersumber dari perkembangan pemikiran dan perbedaan pendapat di kalangan para pemikir politik Islam tentang hubungan agama dan negara pada masa modern, harus diakui juga bahwa hal itu banyak dipengaruhi oleh tingkat pengaruh Barat atas wilayah Islam.

Sejarah mencatat bahwa pembahasan tentang pemikiran politik Islam sudah dimulai sejak zaman klasik oleh Ibn Abi Rabi', Al-Farabi, Al-Mawardi, Al-Ghazali, Ibn Taimiyah dan Ibn Khaldun.<sup>3</sup> Disamping itu, pada abad ke-19 muncul tiga tokoh pemikir politik Islam kontemporer, yaitu Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, Al-Razig, Al-Maududi dan Muhammad Husain Haikal.<sup>4</sup>

Di Indonesia pemikiran politik Islam sudah dimulai oleh M. Natsir,<sup>5</sup> yang membahas tentang tata negara. Menurutnya Islam berbeda dengan agama-agama lain yang mengandung peraturan-peraturan atau hukum termasuk hukum pidana dan perdata. Maka untuk melaksanakan tersebut perlu adanya penguasa dan

---

<sup>2</sup> Al-Qur'an telah memberikan petunjuk dalam persoalan-persoalan agidah, syariah, akhlak, termasuk didalamnya kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dengan jalan meletakkan dasar-dasar prinsip umum mengenai persoalan tersebut, Allah SWT menugaskan Rasul SAW, untuk memberikan keterangan yang lengkap mengenai dasar-dasar tersebut. Kami telah turunkan kepadamu *al-Dzikir* (Al-Qur'an) untuk kamu terangkan kepada manusia apa-apa yang diturunkan kepada mereka agar mereka berpikir (Q.S. 16: 44).

<sup>3</sup> Nurcholish Madjid, "Cita-Cita Politik Kita" dalam Bosco Carvallo dan Dasrizal (peny), *Aspirasi Umat Islam Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 20

<sup>4</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 28.

<sup>5</sup> Ahmad Syafii Ma'arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, (Jakarta: LP3ES, 1985), h. 133.



pemerintahan. Adapun bentuk atau sistem pemerintahan umat Islam bebas memilih yang paling sesuai, asalkan tidak bertentangan dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Islam.

Pada tahun 1970-an, masa Orde Baru muncul seorang tokoh pemikiran politik Islam muda, yaitu Nurcholish Madjid, terkenal dengan panggilan Cak Nur. Di antara pokok-pokok pemikirannya, yaitu sekularisasi atau desakralisasi. Gagasan tersebut dalam kehidupan politik menurut Nurcholish Madjid mengandung semangat demokratisasi. Dalam konteks itu membawa implikasi penolakan terhadap gagasan partai Islam atau negara Islam.

## II. PEMBAHASAN

### A. Setting Sosio-Historis Nurcholish Madjid

Nurcholish lahir di Mojoanyar Jombang pada tanggal 17 Maret 1939 dan wafat tanggal 29 Agustus 2005 pada usia 66 tahun. Lingkungan keluarganya termasuk kalangan yang taat beragama, bahkan ayahnya adalah seorang pembela Masyumi yang gigih. Di samping pendidikan awalnya pada madrasah diniyah milik keluarga, Nurcholish masuk juga pada sekolah rakyat (SR) di kampungnya. Setelah itu ia dimasukkan ayahnya ke Pesantren Darul Ulum Rejoso Jombang, namun hanya bertahan dua tahun karena alasan politik. Ayahnya tetap di Masyumi meskipun NU menyatakan keluar, maka ia pun memindahkan Nurcholish dari basis tradisional ke pesantren modern terkenal Darussalam Gontor Ponorogo. Menurut Nurcholish sendiri, disinilah masa paling menentukan pembentukan sikap keagamaannya.<sup>6</sup>

Seusai di Gontor, ia masuk ke IAIN Jakarta mengambil fakultas adab. Semenjak mahasiswa, Nurcholish aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Karena kepekaannya yang tajam, ia menilai ada yang kurang dalam sistem pengkaderan di HMI, yaitu segi materi keislaman. Masa itu yang menarik adalah gagasan Islam dan sosialisme, namun argument pembahasannya banyak yang merasa terpanggil merumuskan dasar-dasar keislaman sebagai pijakan pengkaderan di HMI.<sup>7</sup>

Pada tahun 1968 atas undangan Departemen Luar Negeri AS, Nurcholish berkesempatan untuk mengunjungi negeri tersebut. Selama itu, ia sempat ke

---

<sup>6</sup> Dedy Jamaluddin Malik, Idi Subandy, *Zaman Baru Islam Indonesia Pemikiran dan Aksi Politik Abdurrahman Wahid, M.Amin Rais, Nurcholish Madjid, Jalaluddin Rakhmat*, (Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998), h. 123.

<sup>7</sup> *Ibid.*, h. 125.



berbagai universitas, mengamati kehidupan politik dan sosial-keagamaan serta berdiskusi dengan sejumlah tokoh. Sepulang dari Amerika, ia melanjutkan lawatan ke kawasan Timur Tengah, di antaranya Saudi Arabia, Irak, dan Kuwait. Pengalaman tersebut membuatnya terinspirasi mencari hakikat Islam dan masyarakat muslim, pasalnya negara Barat lebih segalanya daripada negara Islam.

Tahun 1970-an merupakan masa-masa awal pembentukan intelektualnya, yang kemudian dimatangkan dalam tulisannya di berbagai media, misal *Pos Bangsa*, *Tribun*, dan *Mimbar*. Itu merupakan contoh dari pergumulan pemikirannya dalam merespon teori pertumbuhan yang diperdebatkan di masa awal pembangunan orde baru. Tulisan-tulisan tersebut juga mencerminkan komitmen sosialnya atas nasib kaum lemah. Di samping itu, Nurcholish juga menanggapi isu-isu demokrasi, keadilan, kebebasan, dan lainnya. Namun pada intinya, jika dicermati, pangkal yang dominan dari idenya adalah gagasan tentang manusia dan persamaan derajatnya. Konsep-konsep tersebut selanjutnya mendapat kerangka intelektual yang kokoh setelah ia melanjutkan studinya ke Chicago, dengan menyelesaikan program doktor tahun 1984 dalam bidang filsafat/pemikiran Islam. Bersama rekan-rekannya, ia lalu mendirikan Yayasan Paramadina.<sup>8</sup>

Pola pemikiran keagamaan Nurcholish dapat dilacak sejak gelombang pertama pembaruannya melalui ide “Islam yes, partai Islan no.” Di sini awalnya ia menyorot pemanfaatan simbol agama untuk kekuasaan. Kondisi memprihatinkan ini telah berlangsung lama, sementara di sisi lain cita-cita politik legalisme Islam masih bergulir. Lewat jargonnya itu, Nurcholish memangkas harapan utopia sejumlah aktivis Islam, seraya mendorong aktualisasi Islam non-politik dengan menampilkan wajah kulturalnya. Gelombang kedua kontroversinya adalah ide sekularisasi, yang disalahpahami kebanyakan orang karena disamakan begitu saja dengan sekularisme. Pada tahap ini hujatan-hujatan bermunculan, sampai ada yang menuduh Nurcholish sebagai agen Barat yang membawa misi westernisasi. Namun dalam kesempatan lain, Nurcholish selalu memberikan jawaban balik, seraya mengklarifikasinya. Tidak sangka lagi ia telah mengundang perhatian orang banyak, sekaligus memberi kekuatan bagi tegaknya kebebasan intelektual.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Ahmad Amir Aziz, *Neo-Modernisme Islam Di Indonesia: Gagasan Sentral Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), h. 24.

<sup>9</sup> *Ibid.*, h. 26.



Selanjutnya tema lain yang menjadi perhatiannya ialah tentang modernisasi. Dan masa belakangan ini lebih mengarah ke usaha menampilkan Islam secara Inklusif, dalam rangka untuk lebih mengaktualkan nilai-nilai keislaman masa modern. Di samping itu, sebagai pemikir yang cukup memiliki otoritas, pandangan-pandangan Nurcholish tidak semata berhubungan dengan persoalan-persoalan keagamaan *an sich*, sebab wacana politik pun tidak luput dari perhatiannya.

## **B. Pemikiran Politik Islam Nurcholish Madjid**

Terdapat tiga tema pokok yang menjadi wacana pemikiran politik Islam Nurcholish Madjid, yaitu:

### **1. Pandangan Nurcholish Madjid tentang Konsep Negara**

Gagasan negara Islam menurut Nurcholish Madjid yang pernah muncul dengan kuat dikalangan umat Islam pada masa lalu, adalah kecenderungan apologetik yang muncul dari dua sisi. Pertama, kemunculannya adalah apologi kepada ideology Barat, seperti; demokrasi, sosialisme, komunisme dan sebagainya. Kedua, legalisme telah membawa sebagian kaum muslimin kepada pemikiran negara Islam.

Belajar dari sejarah, sosiologi dan antropologi politik Indonesia menurutnya, bahwa elemen kunci akar ketegangan antara Islam dan negara, dan konflik-konflik ideologi, berbasis keagamaan lebih disebabkan oleh model pemahaman Islam yang bersifat legal-formalistik yang menggambarkan bahwa Islam itu adalah struktur dan kumpulan hukum.<sup>10</sup>

Di sisi lain penolakan Nurcholish Madjid terhadap negara Islam, dikaitkan dengan pandangannya mengenai kehidupan manusia dilandasi iman dan ilmu. Rumusan negara dengan menampilkan syariah menurut Nurcholish Madjid merupakan kekeliruan dalam memahami hubungan antara wilayah iman dan ilmu.

Konsep negara Islam menurut Nurcholish Madjid adalah suatu distorsi hubungan proporsional antara negara dan agama. Negara merupakan suatu kehidupan duniawi, yang berdimensi rasional dan kolektif. Adapun agama merupakan aspek kehidupan yang berdimensi spiritual dan pribadi, untuk itu antara keduanya harus dibedakan dimensinya dan cara pendekatan. Negara tidak

---

<sup>10</sup> Nurcholish melihat bahwa kondisi umat Islam tidak bisa lagi membedakan mana yang agama dan mana yang interpretasi. Mana nilai-nilai yang bersifat duniawi dan mana yang semestinya bersifat ukhrawi. Dalam Azumardi Azra, *Pergerakan Politik Islam*, (Jakarta: Paramadina, 1996), h. 67.



mungkin mengurus dan mengawasi dimensi spiritual atau sikap batin warga negaranya, maka tidak mungkin pula memberi predikat keagamaan kepada negara, sedangkan dalam Islam tidak dibenarkan adanya suatu lembaga ruhaniyah. Dan setiap tindakan yang mengarah kepada kekuasaan ruhani kepada orang lain adalah tindakan yang mengarah kepada sifat ketuhanan, maka hal itu merupakan tindakan musyrik.<sup>11</sup>

Nurcholish Madjid memandang bahwa negara sebagai instrumen, bukan bentuk negara ideal. Islam dalam hal ini, bukan berbicara bagaimana menjadikan negara Islam sebagai suatu bentuk negara ideal, namun bagaimana menjadikan negara sebagai alat untuk meningkatkan kualitas umat dengan menghadirkan nilai-nilai etika Islam dalam negara. Untuk itu menurut Nurcholish Madjid untuk apa sebuah negara mengklaim dirinya sebagai negara Islam tetapi isinya tidak Islami, atau dengan kata lain umat Islam tidak wajib mendirikan negara Islam, tetapi wajib melaksanakan nilai-nilai Islam termasuk melalui pemerintahan yang ada dalam suatu negara.<sup>12</sup>

Sebutan negara Islam menurut Nurcholish tidak pernah digunakan oleh Nabi maupun oleh Khalifah. Khalifah setelahnya yang berlangsung berabad-abad, dan jelas sekali bahwa ia muncul di kalangan umat hanya sebagai gejala modern. Selanjutnya menurut Nurcholish, Islam tidak mengenal persatuan antara agama dan negara dan tidak pula mengenal pemisahan antara agama dan negara. Tidak berpisah karena setiap muslim dalam bersikap harus dalam rangka mendapat ridho Allah, termasuk dalam kehidupan bernegara.<sup>13</sup>

Dengan demikian menurut Nurcholish bahwa nilai dan pemerintahan dalam Islam adalah instrumental dan bukan tujuan itu sendiri. Menurut Nurcholish istilah negara Islam tidak dikenal di dalam sejarah. Buktinya, Nabi Muahmmad SAW baru dimakamkan setelah tiga hari meninggal, hal tersebut dikarenakan penggantinya tidak jelas.<sup>14</sup>

Sampai di sini dapat disimpulkan bahwa gagasan mendirikan negara Islam atau negara dengan ideologi Islam yang diperjuangkan oleh tokoh-tokoh Islam dalam PPKI dan Majelis Konstituante menurut Nurcholish sudah berakhir.

---

<sup>11</sup> Greg Barton, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1999), h. 83.

<sup>12</sup> Abdul Azis Taba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 343.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> M. Syafii Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1995), h. 186.



Dengan demikian, dapat dipahami himbauan yang terkenal “Islam Yes, Partai Islam No”.<sup>15</sup>

## 2. Pandangan Nurcholish Madjid tentang Nasionalisme

Munculnya nasionalisme di kalangan umat Islam, mula-mula diperkenalkan oleh kalangan Turki dan Arab yang pernah tinggal di Eropa. Adapun tokoh yang paling berpengaruh dalam memperkenalkan gagasan seperti tanah air dan bangsa adalah Rifa’ah al-Tahtawi yang pernah tinggal di Perancis, melalui tulisannya ia menggambarkan pengalaman dan pengamatannya atas kebangkitan nasionalisme di Eropa.

Menurut Al-Tahtawi patriotisme adalah sumber kemajuan dan kekuatan sebagai sarana dalam mengatasi gap antara Islam dan Eropa. Kaum muslimin seharusnya meminjam ilmu pengetahuan yang berkembang di Barat, selain tetap berpegang teguh pada prinsip ajaran Islam.<sup>16</sup>

Nasionalisme memang pernah tampil menjadi semacam saingan agama, karena nasionalisme menjadi pusat pandangan hidup. Menurut Nurcholish menjadikan nasionalisme sebagai pusat pandangan hidup memang tidak dibenarkan, tetapi seorang muslim menjadi nasionalisme jelas dibolehkan. Alasan Nurcholish bahwa dalam kenyataan kita mempunyai bangsa dan cirri-ciri tersendiri. Demikian pula secara fisiologis kita berbeda dengan bangsa lain, baik warna kulit, bentuk kulit, bahasa, domisili, dan sejarah pertumbuhan kita sebagai bangsa. Jadi adanya bangsa-bangsa (*nations*) adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari. Selanjutnya Nurcholish menjelaskan bahwa yang ditentang oleh Islam bukan nasionalisme tetapi Fasisme seperti yang terjadi di Jerman, Italia dan sebagainya. Dengan demikian tidak ada halangan bagi seorang muslim untuk menjadi seorang nasionalis dalam pengertian *Syu’ub (nations)* atau bangsa, gobail yang berarti suku, untuk saling berhubungan bukan saling unggul-unggulan.<sup>17</sup>

Dari perspektif sejarah Islam, perkembangan negara nasional adalah sejenis saja dengan perubahan-perubahan dari masa Khulafa-al-Rasyidin ke dinasti ‘Umayyah, berlanjut kepada ‘Abbasiyah dan seterusnya. Menurut Nurcholish adanya negara-negara nasional itu tidak apa-apa. Kalaupun pada masa sekarang ini kita menolak negara nasional dan memaksakan negara universal atau negara imperial yang meliputi seluruh dunia Islam, jelas tidak mungkin, karena itu perkembangan sejarah.

<sup>15</sup> *Op.cit.*, h. 344.

<sup>16</sup> Lihat Azyumardi Azra, *op.cit.*

<sup>17</sup> M.Syafii Anwar, *op.cit.*, h. 187.





Oleh karena itu, ciri-ciri negara kota yang dipimpin oleh Nabi SAW di Madinah merupakan salah satu model nasionalisme yang sangat egalitarian dan partisipatif, merupakan contoh negara yang selalu menerapkan nilai-nilai etis seperti musyawarah, keadilan dan egalitarianisme yang menurut banyak tokoh intelektualisme Islam adalah Piagam Madinah. Mereka memandang Piagam Madinah sebagai rumusan pemerintahan yang mengatur hubungan sosial-politik di kalangan anggota masyarakat Madinah.<sup>18</sup>

### 3. Pandangan Nurcholish Madjid tentang Demokrasi

Sebuah kenyataan bahwa demokrasi selalu menjadi perhatian kemanusiaan sejagad. Ia adalah pilar peradaban, tidak ada satu kelompok atau bangsa pun yang menolak sejauh demokrasi diartikan sebagai usaha mewujudkan kedaulatan rakyat secara penuh. Termasuk di Indonesia, gagasan demokrasi dan demokratisasi terus menggulir seiring dinamika politik.

Menurut Nurcholish bahwa demokrasi yang kita miliki sebagai ideology bukan hanya karena nilai-nilai demokrasi itu dibenarkan dan didukung oleh semanga ajaran Islam. Tetapi juga karena fungsinya sebagai aturan permainan terbuka. Bagi Nurcholish terdapat titik temu antara agama dan demokrasi khususnya bila dikaitkan dengan tujuan keduanya, yaitu cita-cita untuk kebaikan semuanya, maka tidak heran menurutnya penerimaan umat Islam terhadap demokrasi bersifat alami.<sup>19</sup>

Demokrasi menganut pandangan dasar kesetaraan manusia, sehingga hak-hak individu dapat dijamin kebebasannya. Demokrasi akan bertahan manakala tersedia banyak jalan untuk mencapai kesepakatan. Nurcholish mengakui bahwa perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar, sehingga bagi Nurcholish tumbuhnya sistem yang mengenal oposisi merupakan suatu kewajaran. Namun dalam hal ini yang dibenarkan adalah apa yang disebut oposisi legal yaitu oposisi yang dilakukan demi tercapainya cita-cita bersama-sama.<sup>20</sup>

Kuatnya tuntutan demokrasi menurut Nurcholish dikarenakan ia merupakan suatu sistem yang bisa menjamin keteraturan publik dan sekaligus mendorong transformasi sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan yang lebih adil, egaliter dan manusiawi. Fenomena Indonesia masa Orde Baru menurutnya menunjukkan bahwa demokrasi berjalan pincang. Kebebasan berbicara dibatasi, hak-hak minoritas tidak mendapat perhatian, maka yang hidup adalah kekuasaan

<sup>18</sup> Bahtiar Effendi, *Islam dan Negara*, (Jakarta: Paramadina, 1998), h. 184.

<sup>19</sup> Ahmad Amir Aziz, *op.cit.*, h. 63.

<sup>20</sup> *Ibid.*, h. 64.





yang sewenang-wenang. Dalam hal ini Nurcholish dengan didorong oleh semangat demokrasi sering melontarkan kritikan atas kebijakan pemerintah.<sup>21</sup>

Walaupun demokrasi selalu berpegang kepada prosedur pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak, namun tidak berarti hak-hak minoritas diabaikan atau dilanggar begitu saja. Demokrasi yang sehat menurut Nurcholish tetap member penghargaan kepada semua golongan termasuk minoritas yang kalah. Jika tidak kemungkinan demokrasi menjadi ketidakadilan, sehingga menimbulkan tirani mayoritas terhadap minoritas, seperti yang pernah terjadi pada demokrasi Amerika pada abad yang lalu.<sup>22</sup>

Ringkasnya, bagi Nurcholish demokrasi dan agama sesungguhnya dapat dipertemukan. Demokrasi dipandang sebagai aturan politik yang paling layak, sementara agama diposisikan sebagai wasit moral dalam pengaplikasian demokrasi.

### III. PENUTUP

Gagasan negara Islam atau Islam sebagai negara tidak lain merupakan bentuk kecenderungan apologetis. Untuk apa sebuah negara mengklaim dirinya sebagai negara Islam tetapi isinya tidak Islami, atau dengan kata lain umat Islam tidak wajib mendidikan negara Islam, tetapi wajib melaksanakan nilai-nilai Islam termasuk melalui pemerintahan yang ada dalam suatu negara.

Eksistensi negara nasional tidak menjadi persoalan. Oleh karena, nasionalisme sebagai paham hidup yang sentral jelas tidak dapat diterima, tetapi seorang muslim menjadi nasionalis adalah tidak menjadi masalah. Yang ditentang Islam bukanlah nasionalisme tetapi fasisme.

Demokrasi merupakan pilihan politik satu-satunya bagi masyarakat Indonesia. Oleh karena, nilai-nilai demokrasi sepenuhnya obyektif dan tidak ada satu pun yang berlawanan dengan norma agama. Dalam aplikasinya harus ada saling mengisi, terutama sekali bahwa agama dapat memberikan kekuatan etik, moral, dan spiritual bagi berkembangnya demokratisasi.

---

<sup>21</sup> Lihat Bachtiar Effendy, *op.cit.*, h. 189.

<sup>22</sup> *Op.cit.*, (Ahmad Amir Aziz), h. 65.



## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M. Syafii, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1995.
- Aziz, Ahmad Amir, *Neo-Modernisme Islam Di Indonesia: Gagasan Sentral Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Azra, Azyumardi, *Pergolakan Politik Islam*, Jakarta: Paramadina, 1996.
- Barton, Greg, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1999.
- Carvallo, Bosco dan Dazrizal (peny), *Aspirasi Umat Islam Indonesia*, Jakarta: LEPPENAS, 1983.
- Effendy, Bachtiar, *Islam dan Negara*, Jakarta: Paramadina, 1998.
- Maarif, Ahmad Syafii, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta: LP3ES, 1983.
- Malik, Dedy Jamaluddin, Ibrahim, Idi Subandy, *Zaman Baru Islam Indonesia Pemikiran dan Aksi Politik Abdurrahman Wahid, M. Amien Rais, Nurcholish Madjid, Jalaluddin Rakhmat*, Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998.
- Pulungan, J. Suyuthi, *Figh Siyasah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara*, Jakarta: UI Press, 1993.
- Thaba, Abdul Azis, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.